

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.
- Asikin, A. d. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Barkatullah,
- Barkatullah, D. A. H. (2019). *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media.
- Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 25.
- Dewi, Y. K., & Jayadi, A. (2018). *Enhancing corporate responsibility to fulfil the right to a clean environment: a lesson learned from Indonesian courts*. In C. Voigt & Z. Makuch (Eds.), *Courts and the Environment* (p. 295). Edward Elgar Publishing.
- Dr. Harmono, S.E., M.Si (2022). *Manajemen Keuangan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2022, hlm 20
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana
- Haque-fawzi, M. G., Iskandar, ahmad syarief, Erlangga, H., Nurjaya, Sumarsi, D., & I. (2022). STRATEGI PEMASARAN Konsep, Teori dan Implementasi. In *Pascal Books*. <http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/4973>
- Harianto, Dedi, and Asep Jamaludin, eds. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Edisi Pertama. Jakarta: Kencana
- Salim H.S. (2007). *Dasar-dasar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2020. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, Edi. *Periklanan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2018.

- Sari, I. P. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share in jar yang Tidak memiliki Izin Edar*. Semarang: Grafindo.
- Sekali, A. S. K. (2023). Digital Marketing Produk Agribisnis untuk Petani dan Pemasok Input Pertanian. In *Publish Buku Unpri Press Isbn: Vol. Vol. 1 No.*
- Sidobalok, J. (2014). *"Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia"*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 39
- Sidharta, Bernard Arief, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan.
- Simatupang, H. Taufik. (2004). *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 8-12.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pers.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono, B. (2015). *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliati, L., & Simanjuntak, M. (2022). *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*. Bogor: IPB Press

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Akbar, M. I., & Fahlevvi, M. R. (2023). Cegah Penyebaran Misinformasi di Media Sosial Menggunakan Peralatan dan Fitur Literasi Digital. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.61124/1.renata.2>
- Al Asghor, A., Arifin, M., & Minin, A. R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penipuan *Trading* Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik. *IURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 304–311. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Amalia, N. I. I., & Antono, M. N. (2023). Analisis Forensik Kasus Penipuan Berkedok Investasi Doni Salmanan Pada *Platform Quotex* Mixghan Norman Antono memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dan bersifat memengaruhi , namun pada kasus tersebut. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Mateandrau)*, 2(2), 133–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/mateandrau.v2i2.1449>
- Amrani, H. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya melalui Sarana Hukum Pidana. *Negara Hukum*, 6(2), 188.

- Amri, P., & Susilawati, M. D. (2023). IMPLEMENTASI KONSEP KONSUMSI BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 68–88. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.242>
- Arifin, F. (2024). Efektivitas Putusan Erga Omnes dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara. *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 12583–12592. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Bustomi, A. (2018). *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN*. 3(2), 91–102.
- Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim,” Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia”, *Jurnalo Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021.
- Daud, A. (2015). *Analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen*. 2, 471–479.
- Dewantoro, F. D., Njatrijani, R., & Lestari, S. N. (2019). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8, 1133–1144.
- Fahmi, M. A. L., Sunarmi, Siregar, M., & Robert. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AFFILIATOR YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK MENYEBABKAN KERUGIAN KONSUMEN. *Sibatik Journal*, 3(4), 487–514.
- Halim, S., Franciska, W., & Zulkifli Noor, Z. (2024). PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI E-COMMERCE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(7), 565–570.
- Hidayat, R. A. R., & Ihya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat yang Beredar Luas di Pasaran. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 247–274. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1038>
- Ibrahim, N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1060–1067. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/art%0Aicle/view/8439%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.i%0Ad/index.php/snk/article/viewFile/8439/62%0A20>
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8–14. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73>

Ksamawantara, I. M. A., Kosasih, J. I., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan *BrokerForex* Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 281–286. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286>

Kumalasari, I., Said, Z., & Suarning. (2022). Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–12.

Laila, K. (2017). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang melanggar tata cara periklanan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1).

Maulana, M. J. (2024). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E COMMERCE TERKAIT KERUGIAN. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 41(1), 41. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4156/3789%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4156>

Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441–450.

Nawi, H. S. (2018). *HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 7(1), 1–8.

Padrisan Jamba, Rizki Tri Anugrah Bhakti,. “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 1 (2017): 48. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.911>.

Paranna, T. N. S., & Andersen, C. (2022). Pertanggungjawaban Hukum *Influencer* dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham dan/atau Mempromosikan *Trading* Berbentuk Binary Option. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 146–156. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i1.70>

Prabowo, W., Puspadari, R. Y., & Latifa, K. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(1), 81–96. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6184>

Pratama, S. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace. *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 182–199. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1356>

- Purbaya, I. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Judi Berkedok Investasi Binary Option Di Indonesia. *Jurnal Suara Keadilan*, 24(2), 75–91. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i2.11330>
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, 12, 789–810.
- Rahman Irsan. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2(08):704-712.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145–164. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
- Ratna. (2006). TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR BERKAITAN DENGAN KASUS INFORMASI YANG MENYESATKAN (*MISLEADING INFORMATION*). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-36, Oktober*(4), 404–419.
- Ratna & Yetty. (2024). Evaluating Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policies And Sustainability Development Goals Achievement In Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1 (April 2024) 1 – 26.
- Sabrisa Khartanta Ginting Suka, M., Almoravid Dungga, W., & Alhasni BakungD. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Produsen Dan Penjual Clothing Line Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1177–1184. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.334>
- Sanjaya, I. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perlindungan Hukum Wisatawan yang Berkunjung ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi di Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 371–376. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4839.371-376>
- Saragih, A. E., Bagaskara, M. F., & Mulyadi. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Siambaton, T., & Tarigan, Y. L. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak. *Visi Sosial Humaniora*, 1(2).
- Tampubolon, W. S. (2017). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 32(3), 684–686. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>

Tjendra, I. J., S, A. A., & Cahyadi, J. (2016). Perancangan Buku Panduan Dasar *Trading* Untuk Pemula. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna*, 1(8), 1– 9.

Utami, Anisa, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE. *Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 1(2), 93– 116.

ARTIKEL ELEKTRONIK

Febriyan. (2022). Jaksa Sebut Korban Doni Salmanan Mencapai 25 Ribu Orang. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1619177/jaksa-sebut-korban-doni-salmanan-mencapai-25-ribu-orang>

Gama Prabowo (2022). 4 Fakta Seputar Platform Quotex yang Menjadi Tren karena Kasus Doni Salmanan. Nextren. <https://nextren.grid.id/read/013177102/4->

Halima. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen: Pengertian, Ciri, Tujuan, Asas dan Contohnya. Terdapat pada [Hukum Perlindungan Konsumen: Pengertian, Ciri, Tujuan, Asas dan Contohnya - Parboaboa](#). Di akses pada tanggal 25 Maret 2025

Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah., 2014, Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan, Udayana University Press, Denpasar

JUNAIDI. (2024). *Trading Forex dan Crypto, Begini Hukum dan Ketentuannya Menurut Fatwa MUI*. MUI Digital. <https://mui.or.id/baca/berita/trading-forex-dan-crypto-begini-hukum-dan-ketentuannya-menurut-fatwa-mui>

Kompas.com. (2022). Polisi: 25.000 Orang Pakai Kode Referral Doni Salmanan di Quotex. [Online]. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/13182301/polisi-25000-orang-pakai-kode-referral-doni-salmanan-di-quotex>. [Diakses pada 28 Oktober 2024]

Lestari, P. P. (2022). Arti Flexing? Gaya Hidup yang Membuat Doni Salmanan dan Indra Kenz Terjerumus ke Penjara. Voi.Id. <https://voi.id/lifestyle/147791/apa-arti-flexing-gaya-hidup-yang-membuat-doni-salmanan-dan-indra-kenz-terjerumus-ke-penjara>

Ridwan Fauzi. (2023). Hukuman Doni Salmanan Diperberat Jadi 8 Tahun Penjara. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rqfn4f409/>

Robert Daniel.(2017). *Kerentanan Konsumen: Landasan Konseptual dan Refleksi*

bagi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Research Gate.
<https://www.researchgate.net/publication/321125222>

Santia. (2025). OJK Siapkan Aturan Baru untuk Pengawasan Influencer Keuangan pada 2025. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5888182/>

Saputro, I. (2022). Miliki Kekayaan Ratusan Miliar di 23 Tahun, Polisi Ungkap Pekerjaan Doni Salmanan di KTP: Buruh Harian. Tribun News. <https://palu.tribunnews.com/2022/03/16/miliki-kekayaan-ratusan-miliar-di-23-tahun-polisi-ungkap-pekerjaan-doni-salmanan-di-ktp-buruh-harian>

SKRIPSI

Ramadhan, M. A. (2023). *ANALISIS PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI* [UNIVERSITAS LAMPUNG].

<http://digilib.unila.ac.id/68499/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/68499/3/3>. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf

Susanti, B. A. (2018). *ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN BERPOLITIK DI INDONESIA DAN FIKIH SIYASAH (ANALISIS PERBANDINGAN)*. UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/Pn.Blb

